**ARTIKEL**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *E-GOVERNMENT***

**DALAM MEWUJUDKAN *SMART GOVERNANCE***

**PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**PEMERINTAHAN KOTA BANDUNG**

**Oleh:**

**BUDI NUGRAHA**

**NPM: 158010061**

**KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI**

**FAKULTAS PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG 2020**

**ABSTRAK**

Penelitian ini didasarkan pada masalah pokok, yaitu *E-Government* dalam mewujudkan *Smart Governance* di Kota Bandungyang masih belum efektiv. Hal ini diduga disebakan oleh belum maksimalnya Implementasi Kebijakan *E-Government* dalam Mewujudkan *Smart Governance* pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Pemerintahan Kota Bandung.

Pendektan dalam penelitian ini tentang implementasi kebijakan dilihat dari konteks kebijakan publik dan administrasi publik sebagai teori induknya untuk mengembangkan khasanah ilmu administrasi publik.Tujuan penelitian menganalisis Implementasi Kebijakan *E-Government* dalam Mewujudkan *Smart Governance* pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Pemerintahan Kota Bandung. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan secara kualitatif dan menggunakan metode deskriptif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Impelemetasi Kebijakan *E-Government* dalam menciptakan *Smart Governance* di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung sudah baik, akan tetapi masih banyak kekurangan. Hal ini bisa dilihat dari penemuan yang didapat oleh peneliti melalui observasi dan wawancara. diantaranya: Pertama, Kedaaan kondisi lingkungan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung sudah baik.. Kedua, meskipun sudah ada pola kerjasama terkait Pengelolaan *E-Government* dalam menciptakan *Smart Governance* tapi dalam tahap pelaksaan masih lemah dalam segi pengawasan. Ketiga, Sarana sudah ada ada tapi belum secara maksimal untuk *E-Government*. Keempat, pola hubungan antar unit kerja dan norma-norma yang berlaku harus lebih ditingkatkan dalam pelaksaannya

Selanjutnya penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan *E-Government* dalam Mewujudkan *Smart Governance* pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Pemerintahan Kota Bandung sudah berjalan dengan semestinya.tetapi belum menyentuh seluruh aspek pencapaian keberhasilan.

*Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengelolaan E-Government..*

**ABSTRACT**

This research was conducted due to the main problem, namely *E-Government*towards *Smart Governance*in Bandung that was still not effective. It might be caused by the implementation of *E-Government*Policy towards  *Smart Governance*in the Office of Communications and Information Technology of Bandung that was not maximum yet .

The approach of this research was about policy implementation in the context of public policy and public administration’s view as the main theory to develop insight of public administration. The purpose of this research was to analyze the implementation of *e-government*policy towards *smart governance*in the Office of Communications and Information Technology of Bandung. This research used qualitative research approach and descriptive method.

The results showed that *E-Government*Policy’s implementation   towards *Smart Governance*in the Office of Communications and Information Technology of Bandung was good, but there were still many disadvantages. It based on the findings after observation and interviews,  including: Firstly, the environmental conditions in the Office of Communications and Information Technology of Bandung are already good. Secondly, although there is already a pattern of cooperation related to *E-Government*Management   towards *Smart Governance*but in fact, the supervision is not maximum yet. Thirdly, although it already exist but not maximum yet for  *E-Government*. Fourthly, the pattern of correlation between work units and the prevailing norms must be improve in implementation.

Furthermore, the conclusion of this research is the Implementation of *E-Government*Policy towards *Smart Governance*in the Office of Communications and Information Technology of Bandung has been running properly but it has not implement to all aspects yet.

*Keywords: Policy Implementation, E-Government Management.*

1. **PENDAHULUAN**

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini suatu proses kebijakan secara keseluruhan dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan, salah satunya adalah Implementasi Kebijakan mengenai Smart City yang dijelaskan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yang meluncurkan program Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI) 2015 di Balai Sidang Jakarta pada 24 Maret 2015. Program tersebut adalah salah satu cara dalam rangka peningkatan kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Daerah melalui inovasi dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.Dalam Bab XXI bertajuk Inovasi Daerah. Dari Pasal 386 hingga Pasal 390 UU 23/2014**,** menjelaskan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi sebagaimana dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam merumuskan Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Bandung kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada prinsip: peningkatan efisiensi; perbaikan efektivitas; perbaikan kualitas pelayanan; tidak ada konflik kepentingan; berorientasi kepada kepentingan umum; dilakukan secara terbuka; memenuhi

nilai-nilai kepatutan; dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Dengan berkembangnya media dan teknologi, kini Bandung sebagai Kota yang pertumbuhannya semakin tinggi membutuhkan sistem perkotaan yang lebih mumpuni. Untuk itu , dizaman yang serba digital ini, kemampuan pengawasan dari pihak Pemerintah Kota perlu diupgrade .Dengan adanya pengawasan kota secara realtime sehingga mampu memecahkan masalah secara efektif dan efisien. Dalam mengatasi hal tersebut Pemerintah Kota tengah mengembangkan suatu konsep pengawasan dengan adanya Bandung Smart City*,* dimana semua Dinas di Pemerintah Kota Bandung terawasi dengan baik.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), menginginkan agar setiap daerah menerapkan konsep **‘***Smart City****’*** atau kota cerdas untuk menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Dikutip dari laman smartcityindonesia.org, sebuah kota bisa dikatakan smart apabila kota tersebut benar-benar dapat mengetahui keadaan kota didalamnya, memahami permasalahan tersebut secara lebih mendalam, hingga mampu melakukan aksi terhadap permasalahan.

*Smart City* atau kota cerdas didefinsikan sebagai sebuah konsep pengembangan dan pengelolaan kota dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menghubungkan, memonitor, dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada didalam kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Dimensi dari konsep *Smart city* menurut Grifflinger dkk (2007:10-14) menjelaskan 6 dimensi dalam konsep *Smart city* sebagai dasar dari penerapan *Smart city* yang kemudian digunakan dalam menghitung indeks *Smart city* 70 kota di Eropa, keenam dimensi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Smart Economy*
2. *Smart People*
3. *Smart Governance*
4. *Smart Mobility*
5. *Smart Environment*
6. *Smart Living*

Adapun dalam penelitian ini kami memfokuskan kepada dimensi *smart Governance*, dimana melihat kesesesuaian pengembangan Kota Bandung menjadi kota *Smart city* dari sisi dimensi Pengelolaan Pemerintahan.

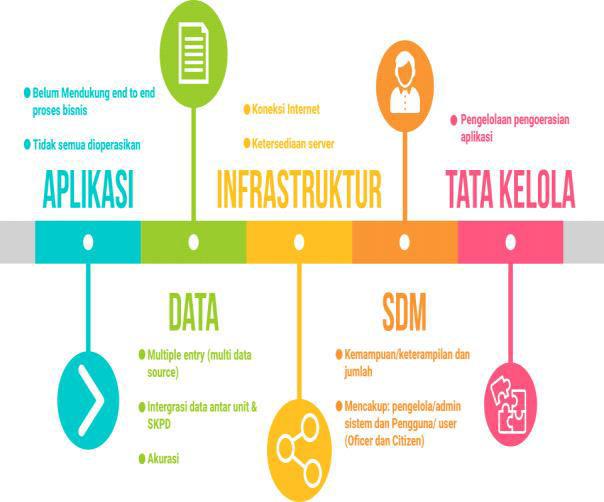
Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah kota Bandung dengan konsep *smart governance* dalam mewujudkan Bandung *Smart City* antara lain :

1. Memasang 5000 titik wifi di setiap Ruang Publik ([http://www.sinarpaginews.com](http://www.sinarpaginews.com/) diakses pada Senin 10 Oktober 2016 pukul 22.31).

1. Aplikasi Panic Button bagi warga Bandung untuk menindaklanjuti tindakan kriminalitas ([https://kominfo.go.id](https://kominfo.go.id/) diakses pada Senin 3 Oktober 2016 pukul 22.34)
2. Pemerintah Kota Bandung meluncurkan program Layanan Aspirasi dan[(https://portal.bandung.go.id/launching-lapor](https://portal.bandung.go.id/launching-lapor)diakses pada Senin 3 Oktober 2016 pukul 22.51).
3. Pelayanan public lewat jaringan sosial media seperti twitter oleh seluruh SKPD Kota Bandung (<https://portal.bandung.go.id/koneksi/sosial-media>diakses pada Senin 3 Oktober 2016 pukul 22.59).
4. Dibangunnya Bandung Command Center sebagai pusat kendali kota Bandung. (<http://www.bumn.go.id/inti/berita>diakses pada Senin 3 Oktober 2016 pukul 23.02).
5. Pembangunan Bandung Technopolis yang akan menjadi prototype penerapan Smart City di Indonesia (<http://jabar.tribunnews.com/2015/03/05/technopolis>diakses pada Senin 3 Oktober 2016 pukul 23.04).

*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung 2016.*

Untuk menjadikan Kota Bandung sebagai kota berlabel *Smart City* tidaklah mudah, sehingga dalam Implementasi Kebijakan *Smart City* masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bandung seperti yang terlihat dalam Gambar berikut



**Gambar 1.1**

**Permasalahan *Smart City***

*Sumber : Data Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, 2016.*

Dari hasil obesvasi peneliti menemukan beberapa fenomen masalah.Peneliti mengambil empat dimensi dalam melihat fenomena permasalahn untuk mengukur keberhasilan Implementasi Kebijkan *Smart City* di Kota Bandung, diantaranya; kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi sumber daya dan karakteristik kemampuan agen pelaksana.

Permasalahan pertama terkait kondisi lingkungan, pertumbuhan penduduk di Kota Bandung terus meningkat dari tahun ketahun, baik dari pertumbuhan alamiah maupun migrasi penduduk dari wilayah lainya Selain itu perubahan karakteristik Kota Bandung dari karakteristik pertanian menjadi perkotaan atau yang biasa disebut wilayah dengan proses urbanisasi, disisi lain sumber daya lahan terbatas dan tetap, sehingga pertumbuhan penduduk tidak bisa di barengi dengan ketersediaan lahan yang nantinya akan menimbulkan kepadatan penduduk, melahirkan permukiman-permukiman kumuh, limbah domestik maupun rumah tangga, kemacetan dan juga masalah-masalah lingkungan lainya, hal ini apabila terus di biarkan tentu akan menimbulkan kota yang tidak sehat, sehingga perlu upaya penyelesaianya.

Dimensi hubungan organisasi, terdapat beberapa permasalahan yang ditemui oleh penulis saat melakukan pra penelitian di Pemerintah Kota Bandung. Permasalahan utama adalah keengganan SKPD untuk membagi data kepada Diskominfo.Anggapan yang ada, apabila Diskominfo ingin mengolah data dan mengintegrasikan data maka silahkan Diskominfo mencari data sendiri.Hal ini memperlihatkan kurangnya komitmen SKPD dalam menerapkan *smart government*. Beberapa permasalahan lain terkait pelaksanaan smart city, khususnya pada dimensi *smart government* diduga juga banyak terjadi dalam penerapannya.

Segi komunikasi, yaitu sosialisasi yang dilakukan Pemerintah kota Bandung belum merata di setiap wilayah daerah serta kebijakan tersebut belum seluruhnya diterapkan oleh kabupaten / kota .

Padahal Sosialisasi mengenai *Smart City* telah dilakukan oleh Pemerintahan Kota Bandung salah satunya dengan diadakannya Smart City Forum yang dilaksanakan di Ballroom Trans Luxury Hotel Bandung, Jumat 2 September 2016 oleh Bapak Ridwan Kamil selaku Walikota Bandung. *Smart City* Forum yang dihadiri oleh 38 kepala daerah dan perwakilan dari 76 Kabupaten/kota se-Indonesia.

Permasalahan selanjutnya mengenai sumber daya, sumber daya manusia dan sumber daya nonmanusia (infrastruktur). Melaksanakan suatu kebijakan para pelaksana kebijakan harus mengetahui dan memahami apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu kebijakan. Namun dalam pelaksanaannya belum semuanya memahami kebijakan yang dibuat, sehingga Pemerintah Kota Bandung mengadakan diklat khusus untuk mendalami program *Smart City* tersebut bagi para pegawai khususnya pegawai yang berada di Dinas komunikasi dan Informatika karena Dinas ini sebagai implementor.

Sumber daya non manusia Pemerintah Kota Bandung saat ini berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan memperbaiki infrastruktur jaringan melalui pembangunan daktin ,yaitu penurunan kabel-kabel listrik melalui pipa ke dalam bawah tanah serta membuat MCF (*microcellful*), gunanya untuk penyebar sinyal HandPhone. Pembangunan dakting dilakukan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam mengakses pelayanan serta memperindah estetika tata ruang kota agar terlihat rapi.

Selain itu, sosialisasi yang belum merata di setiap wilayah daerah disebabkan oleh masyarakat yang belum melek teknologi .Masih banyak masyarakat yang tidak tahu teknologi bahkan jarang mengakses internet maupun media lainnya sehingga informasi tidak tersampaikan.Padahal berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Bandung untuk mensosialisasikan Penerapan Smart City di masyarakat yaitu melalui berbagai media seperti, media cetak, online, radio, TV.

Permasalahan selanjutnya mengenai Sumber Daya, Sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam mencapai terlaksananya *Smart City*, tetapi faktanya penempatan pegawai di Pemerintahan belum sesuai dengan skill yang dimiliki. Baru dalam tahap penempatan SDM yang handal dibidang teknologi (IT) sehingga untuk pembenahan dan kelancaran program smart city, Pemerintahan Kota Bandung merekrut tenaga out sourching khususnya dalam bidang IT .Perekrutan ini sangat ketat dari seribu pendaftar hanya 5 orang saja yang diterima karena mereka merupakan pegawai yang handal dibidang IT.Pegawai yang ahli di bidang IT ini sangat penting dalam menunjang pelaksanaan Smart City seperti yang disampaikan oleh Kepala Sarana Prasarana Telematika dan Kepala Sub Bagian Umum di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintahan Kota Bandung.

Disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan, Jika suatu pelaksana kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan harus mengetahui dan memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

Namun hingga saat ini masih ada beberapa hal yang sulit untuk diubah, terutama hal terkait perilaku.Salah satu contohnya adalah perilaku birokrasi.Misalnya, dalam hal perizinan, masih banyak aparat Pemerintah Kota yang bekerja terlalu lamban.Sehingga, Walikota yang harus turun tangan sendiri ke lapangan untuk sidak.

Perilaku birokrasi sangat berpengaruh dalam membangun sebuah Kota yang Smart, sehingga dalam pelaksanaan program Smart City menjadikan kota yang efisien untuk masyarakat, kota yang layak tinggal, pelayanan publik terjadi dengan baik, tingkat perekonomian tinggi, serta tingkat infrastruktur kota tertata dan rapih. Untuk itu Pemerintah Kota Bandung ingin mewujudkan itu semua dengan membangun *Smart People* sebagai penunjang *Smart City*. Namun, Untuk menjadikan *Smart People* itu tidaklah mudah sehingga Walikota Bandung terlebih dahulu membangun Smart Government karena pemerintah sebagai implementor dalam *Smart City*.

Berdasarkan pemaparan fenomena yang di mulai latar belakang penelitian yang bermuara pada masalah penelitian tersebut di atas, maka peneliti akan mengkaji secara lebih mendalam fokus penelitian pada *Unsuccesfull* Implementasi Kebijakan Publik. Pada instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintahan Kota Bandung dan lebih fokus dibagian/Sub Bag Umum melalui penelitian dalam bentuk tesis dengan judul**:“ Implementasi Kebijakan *E-Government* dalam mewujudkan *Smart Governance* pada Dinas Komunikasi dan Informatika”.**

# Fokus Penelitian

Adapun dalam penelitian inimemfokuskan pada *Smart Governance*, dimana melihat kesesesuaian pengembangan Kota Bandung menjadi kota *Smart city* dari sisi dimensi Pengelolaan Pemerintahan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara dan studi literatur yang mana hasilnya dapat diketahui bahwa sosialisasi mengenai *Smart Governance* yang belum merata, infrastruktur yang belum memadai, kurangnya pemahaman aparatur mengenai *Smart Governance* dan Sistem Operasional Prosedur hanya mengacu pada Roadmap Pemerintah Kota Bandung.

# Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti mengemukakan pernyataan masalah Implementasi Kebijakan *Smart City* Kota Bandung yang belum efektif dan efesien. Selanjutnya berdasarkan pernyataan masalah tersebut dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan *E-Government* dalam mewujudkan *Smart Governance* pada Dinas Komunikasi dan InformatikaPemerintah Kota Bandung?
2. Strategi apa yang perlu dilakukan untuk Implementasi Kebijakan *E-Government* dalam mewujudkan *Smart Governance* padaDinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung?

### Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Mengkaji dan menganalisis Implementasi Kebijakan E-Government dalam mewujudkan *Smart Governance* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung.
2. Menganalisis strategi apa yang harus dilakukan Implementasi Kebijakan *E-Government* dalam mewujudkan *Smart Governance* pada Dinas Komunikasi dan InformatikaPemerintah Kota Bandung .

### Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini dapat mengembangkan khasanah keilmuan, khususnya Ilmu Kebijakan Publik yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan *Smart Governance*  pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung .
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan untuk kepadaDinas Komunikasi dan InformatikaPemerintah Kota Bandung, terkait dengan Implementasi Kebijakan *Smart Governance*.

# Fokus Penelitian

Adapun dalam penelitian inimemfokuskan pada *smart Governance*, dimana melihat kesesesuaian pengembangan Kota Bandung menjadi kota *Smart city* dari sisi dimensi Pengelolaan Pemerintahan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara dan studi literatur yang mana hasilnya dapat diketahui bahwa sosialisasi mengenai *Smart City* yang belum merata, infrastruktur yang belum memadai, kurangnya pemahaman aparatur mengenai *Smart City* dan Sistem Operasional Prosedur hanya mengacu pada Roadmap Pemerintah Kota Bandung.

# Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti mengemukakan pernyataan masalah Implementasi Kebijakan *Smart City* Kota Bandung yang belum efektif dan efesien. Selanjutnya berdasarkan pernyataan masalah tersebut dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan *E-Government* dalam mewujudkan *Smart City* pada Dinas Komunikasi dan InformatikaPemerintah Kota Bandung?
2. Apa strategi dalam Implementasi Kebijakan *E-Government* dalam mewujudkan *Smart City* padaDinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung?

**Tujuan Penelitian**

1. Mengkaji dan menganalisis Implementasi Kebijakan E-Government dalam mewujudkan Smart City pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung.
2. Menganalisis strategi Implementasi Kebijakan *E-Government* dalam mewujudkan *Smart City* pada Dinas Komunikasi dan InformatikaPemerintah Kota Bandung .

### Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini dapat mengembangkan khasanah keilmuan, khususnya Ilmu Kebijakan Publik yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan *Smart City* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung .
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan untuk kepadaDinas Komunikasi dan InformatikaPemerintah Kota Bandung, terkait dengan Implementasi Kebijakan *Smart City.*
3. **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKAN BERFIKIR DAN PROPOSISI**

Penelitian biasanya diawali dengan ide-ide atau gagasan dan konsep-konsep yang dihubungkan satu sama lain melalui hipotesis tentang hubungan yang diharapkan. Ide-ide dan konsep-konsep untuk penelitian dapat bersumber dari gagasan peneliti sendiri dan dapat juga bersumber dari sejumlah kumpulan pengetahuan hasil kerja sebelumnya yang kita kenal juga sebagai literatur atau pustaka. Literatur atau bahan pustaka ini kemudian kita jadikan sebagai referensi atau landasan teoritis dalam penelitian.

Kajian pustaka: menjelaskan laporan tentang apa yang telah ditemukan oleh peneliti lain atau membahas masalah penelitian. Kajian penting yang berkaitan dengan masalah biasanya dibahas sebagai subtopik yang lebih rinci agar lebih mudah dibaca.

Menurut Dougherty & Pfaltzgraff (1990: 15-16), Teori adalah alat intelektual yang berfungsi:

1. Membantu menyusun pengetahuan kita, menanyakan pertanyaan-pertanyaan penting, dan memandu perumusan prioritas dalam penelitian dan menyeleksi metode yang digunakan dalam penelitian.
2. Membantu menghubungkan pengetahuan di satu bidang dengan bidang yang lain.
3. Memberikan kerangka untuk mengevaluasi rekomendasi kebijakan, baik eksplisit maupun implisit, yang ada dalam ilmu-ilmu sosial.

Penulis mengidentifikasi Grand Teori, Middle Teori dan Applied Teori untuk diterapkan pada penulisan karya tulis ini.ada gambar 2.1 berikut ini :

**Grand Teori** merupakan dasar lahirnya teori-teori lain dalam berbagai level. Disebut makro karena teori-teori ini berada pada level makro **Middle Teori** merupakan teori yang berada pada level mezo/menengah dimanafokus kajiannya makro dan mikro. **Applied Teori** merupakan teori yang berada di level mikro dan siap diaplikasikan dalam konseptualisasi (Dougherty & Pfaltzgraff 1990, 10-11)

*Grand Theory*

Kebijakan Publik

Fermana, 2009 : 30-31)

Jones (1999:47)

Mustopadidjaja (1992:30)

Agustino (2008:8)

*Middle Range Theory*

Implementasi Kebijakan Publik

Susilo (2007 : 174)

Nurdin dan Usman (2004:70)

Grindle (1980: 7)

*Applied Theory*

*Faktor-faktor yang mempengaruhi*

*implementasi kebijakan public*

G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (Subarsono, 2005:101)

**Gambar 2.1 Ruang Lingkup Teori**

Pola Tinjuan Pustaka

Sumber: Diolah oleh peneliti.

**Konsep Administrasi Publik**

Administrasi publik (*public administration*) yang lebih dikenal di Indonesia dengan istilah administrasi negara, selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut administrasi publik, merupakan salah satu aspek dari kegiatan pemerintahan. Administrasi publik merupakan salah satu bagian dari ilmu administrasi yang erat kaitannya dengan proses politik, terutama kaitannya dengan perumusan berbagai kebijakan negara, sehingga administrasi publik itu sudah dikenal sesuai dengan keberadaan sistem politik di suatu negara. Oleh karena itu Kasim (1994:8) menyatakan:

Administrasi publik sangatlah berpengaruh tidak hanya terhadap tingkat perumusan kebijakan, melainkan pula terhadap implementasi kebijakan, karena memang administrasi publik berfungsi untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh para pembuat kebijakan politik.

Pemahaman di atas, memperlihatkan bahwa administrasi publik berdampak pada tingkat perumusan kebijakan, juga pada implementasi kebijakan karena administrasi publik memiliki tujuan program yang ditentukan oleh para perumus kebijakan negara. Menurut Dimock dalam Suradinata (1993: 33) bahwa: “*The administration process is an integral part of political process of the nation*”. Dengan demikian proses administrasi sebagai proses politik merupakan bagian dari proses politik suatu bangsa. Hal ini bisa dipahami.karena berdasarkan perkembangan paradigma administrasi pada dasarnya administrasi publik itu berasal dari ilmu politik yang ditujukan agar proses kegiatan kenegaraan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Konteks politik, administrasi publik sangat berperan dalam perumusan kebijakan negara. Hal ini dikemukakan oleh Henry Terjemahan Lontoh (1993: 33) yang menyebutkan bahwa: “*For the later of the twentieth century, the public bureaucracy has been the locus of public policy formulation and the major determinant of where this county is going*”. Pendapat tersebut menjadi bagian dari kebijakan publik dan faktor penentu bagi proses peradaban yang sedang maju.

Perkembangan administrasi publik mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan kehidupan dan perkembangan kemajuan masyarakat yang dibarengi dengan perubahan paradigma berpikir. Kasim (1994:8) menyatakan bahwa:

Perkembangan administrasi publik di suatu negara banyak dipengaruhi oleh dinamika masyarakatnya, di mana keinginan masyarakat tersalur melalui sistem politik, sehingga administrasi publik dapat merasakan tantangan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat yang selalu berubah.

Administrasi publik telah dipandang sebagai bagian yang sama pentingnya dengan fungsi pelaksanaan kebijakan negara (*public policy implementation*). Birokrasi pemerintah telah menjadi wadah perumusan kebijakan negara dan penentu utama ke mana negara itu akan dituju. Pendapat tersebut di dukung oleh Gordon dalam Henry terjemahan Lontoh (1993: 21-22) yang menyatakan:

Birokrasi pemerintah semakin dituntut untuk menerapkan unsur-unsur efisiensi agar penggunaan sumber daya berlangsung secara optimal di sektor publik.Selain itu, dituntut adanya keahlian administratif sehingga dapat diwujudkan pemerintahan yang efisien atau dengan perkataan lain, pejabat dalam administrasi pemerintah dapat ditingkatkan menjadi lebih profesional

Berdasaskan pendapat di atas, sebaiknya birokrasi pemerintah melakukan tindakan efisien dalam penggunaan perangkat lunak maupun perangkat keras dan juga menempatkan orang sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Menurut Gordon dalam Henry terjemahan Lontoh (1993: 6) menyatakan bahwa ciri dari:

Administrasi publik tercermin dari definisi dan individu yang bertindak sesuai dengan peranan dan jabatan sehubungan dengan pelaksanaan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif, eksekutif dan peradilan.

Pendapat tersebut secara implisit menganggap bahwa administrasi publik terlibat dalam seluruh proses kebijakan publik. Terminologi tentang kebijakan publik (*public policy*) itu sendiri menurut Wahab (1997: 2), bahwa:

Kebijakan publik menggunakan istilah yang berbeda-beda, karena memang ada yang menggunakan terminologi *public policy* dengan istilah kebijakan publik dan ada pula yang menggunakan istilah kebijaksanaan publik.

Tetapi tampaknya para ahli lebih banyak yang menggunakan istilah kebijakan publik. Istilah kebijakan mengarah kepada produk yang dikeluarkan oleh badan-badan publik yang bentuknya bisa berupa peraturan perundangan dan keputusan-keputusan, sedangkan kebijaksanaan lebih menitik beratkan kepada fleksibilitas sesuatu kebijakan. Adanya perbedaan pengertian tersebut sebenarnya karena munculnya dua konteks istilah yang berbeda, baik dalam konteks Indonesia maupun dalam konteks Inggris, sehingga mengembangkan pengertian dan makna yang berbeda dipahaminya.

Walaupun mengandung makna yang berbeda antara istilah kebijakan publik dan kebijaksanaan publik, tetapi hakekat kedua istilah tersebut terkait dengan hasil rumusan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kenegaraan sebagai hasil rumusan dari berbagai aspirasi yang diambil dari berbagai kelompok kepentingan di dalam masyarakat. Selanjutnya produk keputusan dimaksud dijadikan sebagai produk administrasi publik yang harus dijalankan oleh lembaga-lembaga negara sebagai kebijakan negara yang harus diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

**Konsep Kebijakan Publik**

Konsep dasar tentang kebijakan publik sebenarnya bermula dari bangsa Yunani dan Romawi yang mengambil konsep publik dan privat. Bangsa Romawi mendefinisikan kedua istilah tersebut dalam *term res publica* dan *res priva*. Gagasan publik dan privat pada masa Yunani kuno diekspresikan dalam istilah konion (yang dapat diartikan publik) dan idion (yang bisa diartikan privat). Kemudian sejarah studi kebijakan publik sudah dapat dirasakan keberadaannya sejak abad ke 18 SM pada masa pemerintahan Babilonia yang disebut dengan Kode Hammurabi. Kode ini mengekspresikan keinginan membentuk ketertiban publik yang bersatu dan adil pada masa ketika Babilonia mengalami transisi dari Negara kota kecil menjadi wilayah yang luas (Fermana, 2009 : 30-31).

Teori *public policy* disebutkan bahwa suatu kebijakan pemerintah dirumuskan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Permasalahannya (*problem*) tersebut muncul ke permukaan karena adanya kebutuhan masayarakat yang tidak terealisasi.

Istilah “Kebijakan” dan “Publik” dalam Kebijakan Publik dapat disimak melalui beberapa defenisi tentang kebijakan publik yang dikumpulkan dari berbagai macam literatur. Pendefinisian berguna untuk menyediakan informasi bagi para perumus dan penganalisis kebijakan publik dikemudian hari manakala mereka berdiskusi dalam ruang politis (Nawawi, 2009 : 7). Sedangkan menurut Nugroho (2003) dalam (Nugroho, 2014 : 105), kebijakan publik tidak pernah muncul di “ruangan khusus”. Kebijakan publik sebagai studi bagaimana, mengapa dan apa efek dari tindakan aktif (*action*) dan pasif (*inaction*) pemerintah atau kebijakan publik adalah studi tentang apa yang dilakukan pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut (Fermana, 2009 : 34). Kebijakan publik dalam definisi yang terkenal dari Thomas Dye (1981:1) adalah segala apa yang dilakukan pemerintah maupun apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Jones (1999:47) yang mengutip pernyataan Larry Berman (1982) menyatakan :

Kebijakan merupakan keputusan tetap yang dicirikan oleh pelaku bersifat konsisten dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.Menurutnya, kebijakan merupakan pedoman bagi pimpinan untuk mengambil keputusan, baik dalam memecahkan masalah-masalah yang terjadi maupun untuk mencegah timbulnya masalah.Kebijakan ini dapat dijadikan pedoman bagi tindakan pimpinan maupun bawahan pada semua tingkatan dan berbagai fungsi.

Berdasaskan pendapat di atas, bahwa kebijakan merupakan suatu keputusan tetap yang bersifat konsisten dan pengulangan dari orang yang membuat maupun yang menjalankan keputusan tersebut, juga keputusan ini dapat dijadikan sebuh pedoman tindakan pimpinan dan bawahan pada semua tingkatan dan berbagai fungsi. Sementara itu, Mustopadidjaja (1992:30) memberikan pengertian :

Kebijakan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan pemerintah, seperti perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan.

Kaitannya dengan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik.Pada intinya dapat ditarik pengertian singkat dan umum bahwa kebijakan publik merupakan upaya untuk menanggulangi masalah publik, maka itu kebijakan berorientasi kepada kepentingan publik (Utomo, 2003:268).

**Tahapan Proses Kebijakan**

Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks dan penuh tawar menawar berbagai macam kepentingan yang timbul dalam proses tersebut hal ini dikarenakan oleh aktor atau banyak aktor yang menginginkan hasrat kepentingannya terpenuhi selain itu banyaknya variabel yang harus dikaji dan diteliti. Selain itu juga menurut Hutomo (1999:12) menyatakan :

Kebijakan publik merupakan suatu proses yang sangat kompleks dan dinamis yang terdiri dari berbagai unsur kontribusi yang berbeda satu dengan yang lainnya Disamping itu proses pembuatan kebijakan memerlukan rasa tanggungjawab yang tinggi dari suatu kemauan untuk mengambil inisiatif dan resiko.

Oleh karena itu, banyak ahli politik membagi proses penyusunan kebijakan ke dalam beberapa tahap. Adapun proses pembuatan kebijakan publik menurut Dunn (2006:143) dapat dilihat sebagai berikut :

1. Penyusunan Agenda

Pada tahap ini adalah tempat dimana para masalah disaring atau dipilih kira-kira masalah mana yang pantas diagendakan untuk dijadikan masalah pubik, masalah yang kira-kira paling penting haruslah menjadi prioritas.

1. Formulasi Kebijakan

Para pejabat merumuskan alternative kebijakan untuk mengatasi masalah.Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif keputusan peradilan dan tindakan legislatif.

1. Adopsi Kebijakan

Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus diantara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

1. Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.

1. Penilaian Kebijakan

Unit–unit pemeriksaan dan akutansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif dan Yudikatif memenuhi persyaratan perundang-undangan dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Perumusan Masalah Kebijakan

Peramalan

Rekomendasi

Pemantauan

Penilaian

Penyusunan Agenda

Formulasi Kebijakan

Adopsi Kebijakan

Implementasi Kebijakan

Penilaian Kebijakan

**Gambar 2.1 Tahapan Proses Pembuatan Kebijakan Publik (Dunn, 2000)**

Sumber: William N Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua (terj. Muhadjir Darwin) Yogyakarta. Gajah Mada University Press, 2000 hlm 25.

**Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Susilo (2007 : 174) Implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Dalam Oxford Advance Learner Dictionary dikemukan implementasi adalah “*put something info effect*” (penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak).

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan.Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002), mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:70) mengemukakan bahwa ”implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh Mclaughin (dalam Nurdin dan Usman, 2004). Adapun Schubert (dalam Nurdin dan Usman, 2002:70) mengemukakan bahwa ”implementasi adalah sistem rekayasa”.

Nurdin dan Usman (2004:70) menjelaskan bahwa pendekatan pertama, menggambarkan implementasi itu dilakukan sebelum penyebaran (desiminasi). Kata proses dalam pendekatan ini adalah aktivitas yang berkaitan dengan penjelasan tujuan program, mendeskripsikan sumber-sumber baru. Pendekatan kedua, menurut Nurdin dan Usman (2002:70) menekankan pada fase penyempurnaan.

Implementasi dianggap selesai manakala proses penyempurnaan program baru dipandang sudah lengkap. Sedangkan pendekatan ketiga, Nurdin dan Usman (2002;70) memandang implementasi sebagai bagian dari program. Proses implementasi dilakukan dengan mengikuti perkembangan dan megadopsi program-program yang sudah direncanakan dan sudah diorganisasikan.

Uraian di atas diperoleh suatu gambaran bahwa, implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.Implementasi kebijakan mengandung logika yang *top*-*down*, maksudnya menurunkan/menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. Sedangkan formulasi kebijakan mengandung logika *bottonup*, dalam arti proses ini diawali dengan pemetaan kebutuhan publik atau pengakomodasian tuntutan lingkungan lalu diikuti dengan pencarian dan pemilihan alternatif cara pemecahannya, kemudian diusulkan untuk ditetapkan.

Grindle (1980: 7) menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan Van Meter dan Horn (Wibawa, dkk., 1994: 15) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle (1980: 7) menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Pandangan Van Meter dan Horn (Grindle, 1980: 6) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*policystakeholders*).

Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan (Nugroho. 2008: 436).Selain itu yang terpenting ialah menjaga konsistensi implementasi kebijakan tersebut. Batasan mengenai apa yang dimaksud dengan implementasi kebijakan telah diketahui maka langkah selanjutnya adalah perlunya mengetahui model dari proses implementasi kebijakan untuk pemahaman lebih lanjut. Proses implementasi bermula ketika tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan pada awal suatu kebijakan (Winarno, 2007: 151).

**Faktor Keberhasian Implementasi Kebijakan**

Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan suatu program, Subarsono dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi), mengutip pendapat G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (Subarsono, 2005:101) mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis. Dimensi-dimensi tersebut diantaranya:

1. Kondisi lingkungan

Lingkungan sangat mempengaruhi pada implementasi kebijakan. Lingkungan ini mencakup lingkungan sosio kultural serta keterlibatan penerima program.

1. Hubungan antar organisasi

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

1. Sumberdaya organisasi

Untuk implementasi program Implementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya baik sumberdaya manusia *(human resources)* maupun sumberdaya non-manusia *(non human resources).*

1. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. ( Subarsono, 2005:101).

Berdasarkan pendapat dari G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli tersebut terdapat faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang diterapkan.Apabila kita ingin mengetahui kebijakan yang diterapkan, kegagalan atau keberhasilannya bisa diukur oleh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan. Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kebijakan dapat melakukan upaya untuk mendorong Pemerintahan Daerah dalam program-program pembangunan dan pelayanan yang sejalan dengan kebijaksanaan nasional khususnya untuk membantu pembiayaannya.

**Konsep Smart City**

**Pengertian Smart City**

*Smart city* atau secara harfiah berarti kota pintar, merupakan suatukonsep pengembangan, penerapan, dan implementasi teknologi yang diterapkan disuatu daerah sebagai sebuah interaksi yang kompleks di antara berbagai sistem yang ada di dalamnya (Pratama, 2014). Tujuan dari pendekatan *smart city* untuk mencapai informasi dan pengelolaan kota yang terintegrasi. Integrasi ini dapat melalui manajemen jaringan digital geografi perkotaan, sumber daya, lingkungan, ekonomi, sosial dan lainnya.

“*The structure of smart city includes perception layer, network layerand application layer, which can make the future world increasingly appreciable and measurable, increasingly interconnection and interoperability and increasingly intelligent*”(struktur dari *smart city* meliputi lapisan persepsi, lapisan jaringan dan lapisan aplikasi, yang dapat membuat masa depan dunia semakin cukup dan terukur, semakin interkoneksi dan interoperabilitas dan semakin cerdas) (Su, Li, & Fu, 2011).

**Pembagian *Smart City***

Amerika Serikat dan Eropa merupakan negara dan benua yang menjadi pelopor *smart city* di dunia.IBM merupakan perusahaan yang mewadahi berdirinya *smart city,* IBM membagi *smart city* menjadi enam jenis. Keenam jenis pembagian *smart city* tersebut meliputi *smart economy,smart mobility, smart governance, smart people, smart living,* dan *smart environment.* (Pratama, 2014)

1. *Smart Economy*

Ekonomi merupakan salah satu pilar penopang daerah/kota/negara.Pengelolaan ekonomi suatu daerah hendaknya perlu dilakukan dengan lebih baik dan terkomputerisasi. Implementasi dan penilaian *smart city* pada bagian (dimensi) *smart economy* meliputi dua hal, yakni proses inovasi (*innovation*) dan kemampuan daya saing (*competitives*). Kedua hal tersebut berguna untuk mencapai peningkatan ekonomi bangsa yang lebih baik dan pintar, sebab inovasi dan kemampuan daya saing merupakan modal utama untuk kemajuan bangsa serta peningkatan pembangunan sumber daya.Arah pembangunan sumber daya disuatu wilayah diwujudkan melalui peningkatan akses, pemerataan, relevansi, dan mutu layanan sosial dasar, peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja, pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk serta peningkatan partisipasi masyarakat.

1. *Smart People*

Pembangunan senantiasa membutuhkan modal, baik modal ekonomi (*economic capital*), modal manusia (*human capital*) maupun modal sosial (*social capital*).*Smart people* dapat dikatakan sebagai tujuan utama yang harus dipenuhi dalam mewujudkan *smart city.* Pada bagian ini terdapat kriteria proses kreatifitas pada diri manusia dan modal sosial. Berikut kriteria penilaian tersebut antara lain sebagai berikut:

* 1. Adanya jenjang pendidikan formal dalam bentuk sekolah dan perguruan tinggi yang merata kepada masyarakat dan berbasiskan IT seperti penerapan *e-learning*, pemanfaatan sistem informasi sekolah/perguruan tinggi, pembelajaran dengan sarana komputer, penyediaan akses internet untuk sumber informasi/ bahas pembelajaran, dan lain-lain.
  2. Adanya komunitas IT dan komunitas lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi.
  3. Adanya peranan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi.

1. *Smart Governance*

*Smart governance* merupakan bagian atau dimensi pada *smart city* yang mengkhususkan pada tata kelola pemerintahan. Adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat mewujudkan tata kelola dan jalannya pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan demokrasi, serta kualitas dan kuantitas layanan publik yang lebih baik.

1. *Smart Mobility*

*Smart mobility* merupakan bagian atau dimensi pada *smart city* yangmengkhususkan pada transportasi dan mobilitas masyarakat. Pada *smartmobility* ini terdapat proses transportasi dan mobilitas yang *smart,* sehingga diharapkan tercipta layanan publik untuk transportasi dan mobilitas yang lebih baik serta menghapus permasalahan umum di dalam transportasi, misalkan macet, pelanggaran lalu lintas, polusi dan lain-lain.

1. *Smart Environment*

*Smart Environment* merupakan bagian atau dimensi pada *smart city* yang mengkhususkan pada bagaimana menciptakan lingkungan yang pintar. Kriteria penilaian disini mencakup proses kelangsungan dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Untuk mewujudkan *smartenvironment* perlu adanya beragam terapan aplikasi dan komputer dalambentuk *sensor network*dan *wireless sensor network,* jaringan komputer, kecerdasan buatan, *database* sistem, *mobile computing,* sistem operasi, *paralel computing, recognition(face recognition, image recognition), image processing, intellegence transport system,* dan beragam teknologilainnya yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan manusia itu sendiri.

1. *Smart Living*

Pada *smart living* terdapat syarat dan kriteria serta tujuan untuk proses pengelolaan kualitas hidup dan budaya yang lebih baik dan pintar. Untuk mewujudkan *smart living,* terdapat tiga buah sub bagian yang harus dipenuhi, diataranya sebagai berikut:

Fasilitas-fasilitas pendidikan yang memadai bagi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti penyediaan sarana internet gratis dan sehat (bebas dari konten pornografi, kekerasan, melalui sistem*filtering/proxy*), CCTV yang terpasang ditempat umum dan lalu lintas untuk menekan jumlah kriminalitas.

Pemerintah Kota Bandung masih belum dapat mengembangkan kota berbasis *Smart City* setelah dilakukan perbandingan terhadap landasan teori karaktersitik pengembangan *Smart City*dan juga indicator yang diterapkan terhadap kondisi eksisting yang ada. Kota Bandung bahkan tidak menempati tiga besar kota yang berhasil menerapkan konsep *Smart City*berdasarkan standar oleh kementrian PUPR*,*kota yang menempati peringkat pertama adalah Kota Surabaya.

**E-Government**

**Pengertian *E-Government***

*E-Government* menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jatim Drs Sudjono MM di situs www.kominfo.jatimprov.go.id adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain, penggunaan teknologi informasi ini dapat menghasilkan hubungan bentuk baru seperti G2C (*Government toCitezen*), G2B (*Government to Busuness*), dan G2G (*Government to Government*).

Menurut The World Bank, *E-Government* adalah:

“*E-Governmentrefers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government. These technologies can serve a variety of different ends: better delivery of government services to citizens, improve interactions with business and industry, citizen empowerment throught access to information, or more efficient government management* (penggunaan teknologi informasioleh aparat pemerintah mampu meningkatkan hubungan dengan warga negara, pelaku bisnis dan dengan sesama pemerintah itu sendiri. Teknologi Informasi memberikan banyak manfaat di bidang perbaikan pelayanan pemerintah, meningkatkan interaksi dengan pelaku bisnis dan industri, serta pemberdayaan warga negara melalui informasi atau menjadikan manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien.).”

*E-Government* adalah istilah yang menurut beberapa kalangandidefinisikan secara beragam. Intinya adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien.

*Electronic Government* (*E-Government*) merupakan bentukpemanfaatan teknologi informasi dan komputer di lingkungan pemerintahan untuk membantu jalannya proses pemerintahan serta membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas dari layanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

**Penerapan Aplikasi *E-Government***

Terkait dengan penerapan *E-Government*, terdapat banyak contoh penerapannya diantaranya sebagai berikut:

1. Implementasi sistem informasi untuk layanan publik (pendaftaran SIM, KTP, STNK, perizinan, dan lain lain) secara *online* berbasis *web.* Hal ini bentuk implementasi *Smart City* ini adalah pada bagian *Smart Governance.*
2. Pembuatan portal *online* berbasis *web* dan *mobile* untuk diskusi masyarakat dan pemerintah secara terbuka. Misalnya untuk kebijakan, peraturan, keluhan masyarakat, penilaian layanan publik dan lain sebagainya.
3. Pemilihan kepala daerah/ walikota, penghitungan suara dan menampilkan hasil secara *digital, online* dan *mobile.* Beberapa negara di dunia sudah melakukannya, seperti Amerika Serikat yang telah melaksanakan pemilihan umum presiden.

Pemerintah kota Bandung dalam mengelola kota demi mewujudkan *smartcity* dengan berupaya memanfaatkan teknologi dalam memecahkan masalah. *Smart City* sebagai salah satu tujuan kota Bandung yang kini telah mulai diwujudkanmelalui beragam usaha. Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah kota Bandung dengan konsep *smart governance* dalam mewujudkan Bandung *Smart City* antara lain :

1. Memasang 5000 titik wifi di setiap Ruang Publik ([http://www.sinarpaginews.com](http://www.sinarpaginews.com/) diakses pada Senin 10 Oktober 2016 pukul 22.31).

1. Aplikasi Panic Button bagi warga Bandung untuk menindaklanjuti tindakan kriminalitas ([https://kominfo.go.id](https://kominfo.go.id/) diakses pada Senin 3 Oktober 2016 pukul 22.34)
2. Bandung pass/Smart Card [(https://portal.bandung.go.id/pemkot-bandung-dan-bi-luncurkan-bandung-smart-card](https://portal.bandung.go.id/pemkot-bandung-dan-bi-luncurkan-bandung-smart-card)diakses pada Senin 3 Oktober 2016 pukul 22.48**).**
3. Pemerintah Kota Bandung meluncurkan program Layanan Aspirasi dan[(https://portal.bandung.go.id/launching-lapor](https://portal.bandung.go.id/launching-lapor)diakses pada Senin 3 Oktober 2016 pukul 22.51).
4. Pelayanan public lewat jaringan sosial media seperti twitter oleh seluruh SKPD Kota Bandung (<https://portal.bandung.go.id/koneksi/sosial-media>diakses pada Senin 3 Oktober 2016 pukul 22.59).
5. Dibangunnya Bandung Command Center sebagai pusat kendali kota Bandung. (<http://www.bumn.go.id/inti/berita>diakses pada Senin 3 Oktober 2016 pukul 23.02).
6. Pembangunan Bandung Technopolis yang akan menjadi prototype penerapan Smart City di Indonesia (<http://jabar.tribunnews.com/2015/03/05/technopolis>diakses pada Senin 3 Oktober 2016 pukul 23.04).

Bandung *Smart City* dilakukan untuk memangkas jarak dan waktu sebagai salah satu upaya pemerintah Kota Bandung dalam menyelesaikan masalah tanpa perlu adanya tatap muka antarpemerintah kota dengan masyarakat kota Bandung sebagai publiknya. Dalam rangka mewujudkan Bandung *Smart City*, kini Bandung telah memiliki kurang lebih 300 aplikasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan 300 masalah di kota Bandung dan diharapkan akan semakin bertambah.

**Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir yang akan diuraikan pada bagian ini difokuskan dalam menentukan tujuan dan arah penelitian serta untuk memilih referensi yang relevan dengan variabel yang akan diteliti. Dalam konteks ini, peneliti akan mengemukakan teori utama sebagai basis pemikiran untuk menjelaskan struktur hubungan antara aspek-aspek yang terlibat dalam kontelasi masalah implementasi kebijakan pengelolaan dana Dekosentrasi .

Sedangkan Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah. Kemudian menurut sidik (2002:1) menyatakan bahwa:

Dekonsentrasi (*deconcentration*), yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat yang berada dalam garis hirarki dengan pemerintah pusat di daerah.

Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan suatu program, Subarsono dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi), mengutip pendapat G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (Subarsono, 2005:101) mengemukakan bahwa terdapat beberapa dimensiyang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis. Diemnsi-dimensi tersebut diantaranya:

1. Kondisi lingkungan;

Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosiologi kultural serta keterlibatan penerima program.

1. Hubungan antar organisasi;

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

1. Sumberdaya organisasi;

Untuk implementasi program Implementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya baik sumberdaya manusia *(human resources)* maupun sumberdaya non-manusia *(non human resources).*

1. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana;

Yang dimaksud karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. (Subarsono, 2005:101).

Berdasarkan pendapat dari G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli tersebut terdapat dimensi yang menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang diterapkan. Apabila kita ingin mengetahui kebijakan yang diterapkan, kegagalan atau keberhasilannya bisa diukur oleh dimensi-dimensi yang dapat mempengaruhi kebijakan. Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kebijakan dapat melakukan upaya untuk mendorong Pemerintahan Daerah dalam program-program pembangunan dan pelayanan yang sejalan dengan kebijaksanaan nasionalkhususnya untuk membantu pembiayaannya.

Pemerintah Pusat bisa memberi bantuan berbentuk subsidi yaitu transfer dana dari anggaran dan pembukuan pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Alokasi oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah mengandung tujuan yang berbeda-beda yang mempengaruhi bentuk dan lingkupannya.Pengertian subsidi dikemukakan oleh Subarsono dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi).Subsidi adalah semua bantuan finansial pemerintah kepada individu, perusahaan, dan organisasi. Selain itu maksud dari subsidi adalah untuk memberikan bantuan pembiayaan terhadap berbagai aktivitas.

Pandangan di atas, tampak bahwa proses/teknik implementasi pengelolaan dana dekosentrasi sangat berkaitan dengan tercapaianya pengelolaan dana dekonsentrasi yang baik. Untuk melihat hubungan keterkaitan pada gambar berikut ini

**Kondisi**

**Lngkungan**

**Karakteristik dan Kemampuan**

**Study Keputusan Wali Kota Bandung Nomor : 650/Kep. 402 Bappeda/2013 Tentang Tim Pelaksana Persiapan Dan Pelaksanaan Bandung Kota Cerdas (Smart City) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.**

**Implementasi Kebijakan**

**E-Goverment**

**Hubungan antar Organisasi**

**Sumber Daya Organisasii**

**Strategi Implementasi Kebijakan smart city**

Gambar 2.6

Kerangka Berfikir Implementai

Kebijakan Publik Implementasi Kebijakan smart city

G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (Subarsono, 2005:101).

**Proposisi**

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, dimana teori implementasi kebijakan yang peneliti ambil dari G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (Subarsono, 2005:101) mengemukakan bahwa terdapat beberapa dimensiyang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis. Diemnsi-dimensi tersebut diantaranya: (1) Kondisi lingkungan, (2) Hubungan antar organisasi, (3) Sumberdaya organisasi, (4) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain (Subarsono, 2005:90), maka peneliti merumuskan proposisi sebagai berikut:

Jika implementasi **(**Study Keputusan Wali Kota Bandung Nomor : 650/Kep. 402 Bappeda/2013 Tentang Tim Pelaksana Persiapan Dan Pelaksanaan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung)

Jika faktor-faktor yang menghambat Implementasi Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemeritah Daerah dalam BAB XXI Bertajuk Inovasi Daerah terkait mewujudkan *smart city.*

1. Dimensi-dimensi Implementasi Kebijakan *E-Government* berjalan dengan baik dapat mewujudkan *Smart City* pada Dinas Komunikasi dan InformatikaPemerintah Kota Bandung.
2. Strategi dalam Implementasi Kebijakan *E-Government* dalam mewujudkan *Smart City* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandun

## METODE PENELITIAN

## Metode Penelitian

Dalam penelitianini peneliti menggunakan metode penelitian secara kualitatif. Menurut Irawan (2006:5) metode kualitatif disebut sebagai *‘Naturalinguiry* (karena konteksnya yang natural, bukan artifisial), atau *Interpretiveinguiry* (karenabanyak melibatkan faktor-faktor subyektif baikdari informan, subjek penelitiitu sendiri).

### Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder.Perolehan kedua jenis data ini yaitu data sekunder bersumber atau diperoleh melalui penelusuran kepustakaan, dokumentasi, dan laporan kegiatan yang terdapat pada berbagai Satker yang terkait. Data sekunder yag diperlukan berupa lingkup data keuangan, lingkup data pengelolaan e-government dalam mewujudkan smart city. Sedangkan data primer bersumber atau diperoleh dari informan melalui penelitian lapangan yang diharapakan informan dapat memberikan data dan informasi yang jelas dan akurat saat ini tentang implementasi kebijakan e-governmet dalam mewujudkan smar city di Badan Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kota Bandung.

### Penetuan Informan

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat lansung dengan masalah penelitian.Dengan mengunakan metode penelitian kualitatif, maka peneliti sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual, jadi dalam hal ini sampling dijaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber.Maksud kedua dari informan adalah untuk mengali informasi yang menjadi dasar dan rancangan teori yang dibangun.

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan imformasi lengkap dan akurat.Informan dalam penelitian ini adalah para pihakyang dipandang mengetahui secara mendalam berbagai hal menyangkut masalah penelitian ini, sehinggamampu memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam rangka menjawab permasalahan ini.

Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan menjadi informan narasumber *(key informan)* dalam penelitian ini adalah pejabat/aparat Badan Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kota Bandung. Keseluruhan informan ini adalah Pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung dan Infoman tersebut yaitu:

* + - 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung (1 orang).
      2. Kepala Bidang (1 orang) yaitu Bidang Umum Badan Komunikasi dan Informatika dan Informasi Pemerintah Kota Bandung.
      3. Kepala Seksi (1 orang) yaitu diwakili Seksi Umum.
      4. SKPD Pemerintah Kota Bandung (3 orang).
      5. Camat Buah Batu dan Camat Kiara Condong (2 orang).

### Teknik Pengumpulan Data

### Teknik Pengumpulan Data

Wawancara mendalam

Selanjutnya dalam penelitian ini digunakan wawancara mendalam sebagai salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpukan data dan informasi. Penggunaan metode ini didasarkan pada dua alasan, yakni:

* 1. Pertama, melalui wawancara peneliti, untuk menggali apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, dan apa yang tersembunyi jauh didalam subjek pnelitian.
  2. Kedua apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang bersipat lintas waktu.

Wawancara mendalam yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi secara lisan melalui tanya jawab, yang berhadapan lansung dengan sejumlah informan yang dapat memberikan keterangan-keterangan yang berkaitan permasalahan penelitian. Dalam rangka pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur untuk mendapatkan keterangan-keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang informan yang terlibat langsung dalam penyelenggaran Implementasi E-Governmet dalam Mewujudkan Smart Citypada Badan Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kota Bandung.

* 1. Studi Kepustakaan

Studi pustaka yaitu mengumpulkan data dengan cara mencari data serta informasi berdasarkan penelaan literatur atau referensi, baik yang bersumber dari buku-buku dan dokumen-dokumen, laporan-laporan, jurnal-jurnal, kliping, majalah, makalah-makalah yang pernah diseminarkan. Artikel-artikel dari berbagai sumber, termasuk internet maupun catatan-catatan penting yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu Badan Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kota Bandung.

* 1. Observasi Lapangan

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian yaitu Badan Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kota Bandung, Alamat : Jl. Pasteur No. 25, Pamoyanan, Bandung, Jawa Barat, untuk melihat, mewawancarai, mencatat secara sistimatik terhadap unsur-unsur, gejala-gejala dan tingka laku aktual pada objek yang diteliti untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara data penelitian yang telah dikumpulkan melalui pengamatan lansung, wawancara mendalam, dokumen-dokumen pendukung, kemudian diolah sesuai dengan permasalahan yang diangkat, dalam beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Mengorganisasikan Data

Data yang dikumpulkan dari subjek melalui hasil wawancara mendalam (*depth inteviwer*) di lapangan, dibuatkan transkrip interview dengan mengubah hasil wawancara dari bentuk rekaman menjadi bentuk tertulis secara verbatim, untuk dianalisis selanjutnya.

1. Klasifikasi dan Kategori

Data hasil transkrip data interview diberi kode, dikelompokan berdasarkan kategori tema dan pola jawaban kemudian disusun dalam kerangka analisis yang dibuatkan atau disiapkan.

1. Menguji Asumsi

Setelah kategori pola data tergambar dengan jelas, peneliti menguji data tersebut terhadap asumsi yang dikembangkan dalam penelitian ini, sehingga dapat dicocokan apakah ada kesamaan antara landasan teoritis dengan hasil yang dicapai. Walaupun penelitian ini tidak memiliki hipotesis tertentu, namun dari landasan teori dapat dibuat asumsi-asumsi mengenai hubungan antara konsep-konsep yang ada.

**Teknik Analisa Data**

Analisi data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kualitatif yang terproses dari pengumulan data kualitatif menggunakan metode pengamatan sebagaimana yang dikatakan oleh atilima (2005:87):

Bahwa data kualitatif dapat diperoleh dari hasil pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan berbagai metode pengupulan data. Seperti wawancara bertahap dan mendalam, observasi partisipasi, diskusi terfokus, dan penjelasan tentang metode data yang dilakukan pada bagian tentang pengumpulan data (Bungi, 2007 : 77-78).

Dalam analisis ini melewati tahapan-tahapan tertentu dalam proses analisis yakni reblitas dan validitas data. Reabiitas dan vadilitas data digambarkan melalui tringulasi data, pemeriksaan anggota, pengamatan jangka panjang dan berulang, pertimbnagan masalah, alasan keputusan, menjelaskan tentang dan menjelaskan masukan yang dilakuan dalam penelitian ini.

Berdasarkan pada pendapat di atas, maka transkrip interview serta hasil-hasil observasi yang telah terkumpul dilakukan tahapan analisis sebagai berikut:

1. Reduksi data/*data reduction*, yaitu proses pemilihan, pengklarifikasian, pengabstraksian atau transparansi data yang diperoleh di lapangan baik melalui observasi maupun wawancara kepada informan pangkal dan informan kunci. Reduksi data merupakan bentuk analisis menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diferifikasi.
2. Penyajian data/*Data Display*, yaitu sekumpulan informasi dan data yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian tersebut bisa dalam bentuk uraian, grafik, dan bagan.
3. Penarikan kesimpulan/*Conclusion*, yaitu penganalisaan akhir yang diperoleh berdasarkan hasil reduksi data dan penyajian data.

**Instrumen Penelitian**

Instrumen utama pengumpulan data pada sebuah penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, sebagaimana yang disebutkan Garna (1999:33), bahwa “instrumen penelitian adalah manusia itu sendiri, artinya peneliti perlu sepenuhnya memahami dan adaptif terhadap situasi sosial dalam kegiatan penelitian itu”. Berhubungan instrumen penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, maka dalam penelitian ini, peneliti terjun ke lapangan dengan membawa diri sendiri untuk menghimpun sebanyak mungkin data, dengan membawa alat bantu yang diperlukan antara lain: pedoman wawancara, catatan lapangan, alat perekam serta kamera.

### Operasional Parameter

Berkaitan dengan dimensi yang mempengaruhi implementasi kebijakan suatu program, Subarsono dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi), mengutip pendapat G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (Subarsono, 2005:101) mengemukakan bahwa terdapat beberapa dimensi yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis. Dimensi-dimensi tersebut diantaranya:

* 1. Kondisi lingkungan

Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosiologi, kultural serta keterlibatan penerima program.

* 1. Hubungan antar organisasi

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

* 1. Sumberdaya organisasi

Untuk implementasi program Implementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya baik sumberdaya manusia *(human resources)* maupun sumberdaya non-manusia *(non human resources).*

* 1. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

Yang dimaksud karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. ( Subarsono, 2005:101).

Berdasarkan pendapat dari G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli tersebut terdapat dimensi yang menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang diterapkan.Apabila kita ingin mengetahui kebijakan yang diterapkan, kegagalan atau keberhasilannya bisa diukur oleh dimensi-dimensi yang dapat mempengaruhi kebijakan.Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kebijakan dapat melakukan upaya untuk mendorong Pemerintahan Daerah dalam program-program pembangunan dan pelayanan yang sejalan dengan kebijaksanaan nasionalkhususnya untuk membantu pembiayaannya.

**Tabel 3.1**

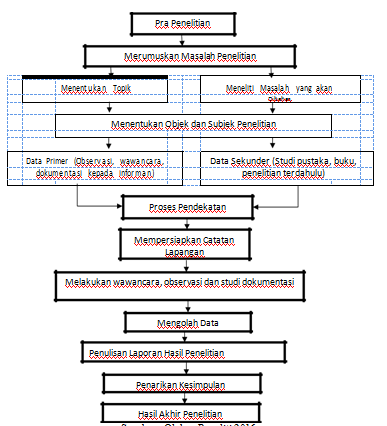
**Operasionalisasi Parameter**

| **Konsep** | **Variabel** | **Dimensi** | **Indikator** | **Penjelasan** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Implemen-tasiKebijakan | Analisis Kebijakan Publik  *(G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinellidalam Subarsono, 2005:101*) | 1.Kondisi Lingkungan  *(G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinellidalam Subarsono, 2005:101*) | 1) Lingkungan  sosiologi | 1. Lingkungan sosiologi Instansi yang mendukung proses Implementasi Kebijakan. |
| 2) Lingkungan  Kultural | 1. Lingkungan kultural Instansi yang membantu proses Implementasi Kebijakan. |
| 3) Keterlibatan  penerima program | 1. Pengelola program di Dinskominfo sebagai penerima program dalam Implementasi Kebijakan. |
|  |  | 2. Hubungan  antar Organisasi  *(G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinellidalam Subarsono, 2005:101*) | 1. Koordinasi | 1. Sistem koordinasi yang diterapakan di Instansi terkait. |
|  |  | 1. Kerjasama antar instansi | 1. Proses kerjasama dengan instansi lain yang berkaitan dengan Implementasi kebijakan. |
|  |  | 3.Sumberdaya organisasi  *(G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinellidalam Subarsono, 2005:101*) | 1. Sumberdaya manusia *(human resources)* | 1. Kemampuan para aparatur (pegawai) dalam menjalanakan proses implementasi kebijakan. |
|  |  | 4.Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana  *(G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinellidalam Subarsono, 2005:101*) | 1. Struktur birokrasi | 1. Struktur Birokrasi (Hirarki) yang jelas untuk menjalan program. |
| 1. Norma-norma | 1. Norma-norma   yang berlaku dalam instansi. |
| 1. Pola-pola hubungan | 1. Pola hubungan yang baik untuk mendukung Implementasi Kebijakan |

***Sumber :G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli(2005***

* 1. **Tahapan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian kualitatif, perlu untuk mengetahui tahapan-tahapan dalam sebuah penelititan dan penelitian tersebut harus sistematif agar diperoleh hasil yang maksimal. Berikut ini adalah alur tahapan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti:

** Gambar 3.2 : Tahapan Penenlitian**

*Sumber : Diolah Penulis 2018*

* 1. **Lokasi dan Jadwal Penelitian**

Penelitian dilakukan pada Badan Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kota Bandung, pelaksanaan penelitian direncanakan selama 6 (enam) bulan dengan rincian jadual sebagai berikut:

**IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Pembahasan**

Pengelolaan *E-Government* dalam menciptakan *Smart Governance* di suatu instansi pemerintahan tentunya sangat memerlukan sistem dam mekanisme yang baik. Untuk menghasilkan pengelolaan yang baik ini harus ada sistem kerja yang baik. Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan kegiatan bisa berjalan lancar sesuai dengan rencana dan konsisten. Tidak terkecuali di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dalam Pengelolaan *E-Government* dalam menciptakan *Smart Governance* sangat diperlukan.

**Impelemetasi Kebijakan *E-Government* dalam menciptakan *Smart Governance* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.**

* + - 1. Kondisi Lingkungan

Keadaan kondisi lingkungan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung sudah baik. Hal ini dibuktikan dari pendapat Informan bahwaada kondisi sosial, kultural dan penerima program dalam Pengelolaan *E-Government* dalam menciptakan *Smart Governance*. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dan para aparatur yang didalamnya selalu berusaha melalui kegiatan-kegiatan dalam mengelola dana *E-Goverment*. Sistem sosial yang diterapkan oleh Instansi Dinas Kesehatan sudah berjalandan budaya kerja sudah bisa diikuti oleh aparatur Dinas, namun apabila ada kekurangan perlu ditingkatkan lagi.

* + - 1. Hubungan antar Organisasi

Darihasil wawancara bersama Informan bisa disimpulkan bahwa dimensi hubungan antar organisasi untuk Implementasi Kebijakan PMK 248 Tahun 2010 tentang Pengelolaan *E-Government* dalam menciptakan Smart Governance pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung sudah berjalan sesuai ketentuan. Hubungan kerjasama Dinas Kesehatan dengan instansi lainnya terkait dalam Pengelolaan *E-Government* dalam menciptakan *Smart Governance* sudah berjalan baik baik dengan Diskominfo atau instansi lainnya. Meskipun sudah ada pola kerjasama terkait Pengelolaan *E-Government* dalam menciptakan *Smart Governance* tapi dalam tahap pelaksaan masih lemah dalam segi pengawasan. Untuk mengatasi hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung melakukan komunikasi secara intens dalam melakukan kerjasama yang lebih baik dalam Pengelolaan *E-Government* dalam menciptakan Smart *Governance* ini.

* + - 1. Sumber Daya

Dari hasil wawancara bersama Informan bisa disimpulkan bahwa dimensi sumber daya untuk Pengelolaan *E-Government* dalam menciptakan *Smart Governance* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung sudah mengerti dalam pengelolaan dana Dekosentrasi. Sarana dan prasara sudah ada ada tapi masih belum secara maksimal untuk mendukung dalam pengelolaan dana dekosentrasi tersebut. Selain itu sanksi yang berlaku sudah berjalan tetapi masih perlu peningkatan aparatur lebih sadar akan tanggung jawab kerjanya.

* + - 1. Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana

Dapat disimpulkan bahwa karakteristik dan kemampuan agen pelaksana implementasi kebijakan khususnya dalam Pengelolaan *E-Government*  dalam menciptakan *Smart Governance* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung sudah baik dan mempuni. Meskipun ada beberapa hal yang harus perlu ditingkatkan untuk mendukung implementasi kebijakan dana *E-Government* supaya lebih baik lagi. Diantara pola hubungan antar unit kerja dan norma-norma yang berlaku harus lebih ditingkatkan dalam pelaksaannya. Agar setiap tanggung jawab dan tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga Pengelolaan *E-Government* dalam menciptakan *Smart Governance* dapat terlaksana secara efektif dan efesien sesuai ketentuan yang berlaku serta terhindar dari masalah-masalah khususnya masalah korupsi.

**Strategi Impelemetasi Kebijakan *E-Government* dalam menciptakan *Smart Governance* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.**

Strategi dimulai dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sebagai faktor internal dan peluang serta ancaman sebagai fator eksternal yang dapat mempengaruhi Implementasi Kebijakan *E-Government* dalam menciptakan *Smart Governance*. Adapun identfikasi tersebut sebagai berikut:

Analisa Lingkungan Internal

1. Kekuatan *(Strengths)*
2. Kekuatan kota Bandung memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten sesuai dengan bidang masing-masing.
3. Terdapat 350 aplikasi yang mendukung Bandung *Smart City*. Diantaranya menampung keluhan masyarakat, mengelola, memberikan infromasi seputar Bandung, mengenai laporan permasalah warga Bandung, memberikan efektifitas kerja , *paperless* hingga 80% , adanya Bandung *Command Center* sebagai pusat kendali teknologi informasi Bandung *Smart City* yang juga dapat dijadikan tempat wisata edukasi, dan mampu mengurangi APBD Bandung Sebesar 1 triliun
   * + - 1. Kelemahan*(Weakness)*
     1. Sosialisasi yang kurang kepada masyarakat mengenai fasilitas teknologi dari aplikasi - aplikasi yang mendukung kebutuhan warga Bandung dan belum adanya portal khusus, belum adanya *maintenance* yang pasti dari Vendor terhadap *Government*
     2. Tidak semua masyarakat mampu mengikuti perkembangan menyangkut teknologi.
4. Analisa Lingkungan Eksternal

1) Peluang *(Opportunities)*

* + 1. Kota Bandung dimana menjadi inspirasi untuk daerah lain yang ingin juga menjadi daerah yang memiliki konsep *smart,* pemerintah setempat mampu mengelola data dan informasi yang ada dengan cepat sehingga bisa memberikan perkembangan yang baik dalam membangun kota Bandung
    2. Menjadikan masyarakat mampu berwirausaha sehingga bisa memperbaiki perekonomian, seperti adanya kredit melati, sistem ini dibuat untuk memberikan dana pinjaman kepada masyarakat untuk dapat menjadi seorang entrepreneu
  1. Ancaman*(Threats)*
     1. Dari segi politik ada beberapa pihak yang masih kurang setuju dengan adanya *smart city* yang sudah berjalan, sulit untuk menerapkan konsep yang sama dalam Bandung *Smart City* terkait selama masa jabatan pemerintah
     2. Adanya ancaman dari sosial setempat terkait adanya fasilitas - fasilitas masyarakat yang sudah berjalan, dan pola pikir masyarakat yang terkadang masih dapat terpengaruh menjadikan sulitnya menyatukan konsep bahwasanya kota yang pintar butuh masyarakat yang pintar juga**.**

Dari kedua faktor lingkungan strategis yang menghasilkan identifikasi beberapa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman tersebut diatas haruslah dilakukan kolaborasi analisis strategi. Ada empat strategi utama yang bisa digunakan untuk menentukan strategi, yakni S – O, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk mencapai atau meraih peluang. Strategi W – O, yaitu strategi menekan kelemahan untuk mencapai atau meraih peluang, strategi S – T, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghadapai tantangan atau ancaman dan strategi W – T, yaitu strategi menekan kelemahan untuk menghadapi tantangan atau ancaman.

**Matrik Silang Analisis SWOT**

Tabel 4.5 Hasil Analisa Strategi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Strength** | | |  |  |  | **Weakness** | |  |
|  |  |  | | |  | |  |  | | | |
| **Opportunity** | Strategi | : yaitu | | | dengan | | adanya | Kolaborasi : yaitu antara vendor dan | | | |
|  | Sumber | Daya | | Manusia | | | (SDM) | pemerintah terkait | | pembangungan | |
|  | yang |  | mumpuni | | |  | dapat | aplikasi – aplikasi yang mendukung | | | |
|  | mempertahankan | | | | produk atau | | | dan membuat portal khusus untuk | | | |
|  | aplikasi |  | terintegrasi | | | | yang | Bandung *Smart City* | | |  |
|  | kemudian dapat dikembangkan, | | | | | | |  |  |  |  |
|  | dengan | demikian perlu | | | | | adanya |  |  |  |  |
|  | sosialisasi. | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Threat** | Inovasi |  | atau | fokus | | : | yaitu | Turn around atau Exit : yaitu dengnn | | | |
|  | terhadap | | kebijakan | | | mengenai | | mengembangkan | | teknologidari | |
|  | dibuatnya | | peraturan | | |  | daerah | aplikasi | sebelumnya atau | | membuat |
|  | untuk | tetap | | mengembangkan | | | | aplikasi dengan teknologi baru yang | | | |
|  | Bandung *Smart City* | | | | |  |  | lebih | cerdas, | juga | memiliki |
|  |  |  |  |  |  |  |  | keamanan yang baik | | |  |

*Sumber: Peneliti 2019.*

**Penentuan Strategi Berdasarkan Hasil Matrik Silang**

1. AnaliIsis Faktor Strategi Internal

**Tabel 4.6**

IFAS Pengelolaan *E-Government* dalam menciptakan *Smart Governance*

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Faktor-faktor Strategi Internal | Nilai | Bobot | Skor  (Bobot X Ratting) |
| **1** | **Kekuatan*(Strengths)*** |  |  |  |
|  | Sumber Daya Manusia (SDM) yangberkompeten | 4 | 0.5 | 3 |
|  | Terdapat 350 aplikasi yang mendukung Bandung *Smart City* | 2 | 0.1 | 0.2 |
| **Jumlah Kekuatan** | |  | **0.6** | **2.2** |
| **2** | **Kelemahan*(Threats)*** |  |  |  |
|  | Sosialisasi yang kurang kepada masyarakat | -2 | 0.15 | -0.3 |
|  | Tidak semua masyarakat mampu mengikuti perkembangan menyangkut teknologi | -2 | 0.25 | -0.5 |
| **Jumlah Kelemahan** | |  | **0.4** | **-0.8** |
| **Tota IFAS** | |  | **1.00** | **1.40** |

*Sumber: Diolah peneliti, tahun 2019.*

Strenght Posture = S + W

= 2.2 + (-0.8)

= 1.40

2. AnaliIsis Faktor Strategi Eksternal

**Tabel 4.7**

EFAS Pengelolaan *E-Government*  dalam menciptakan *Smart Governance*

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Faktor-faktor Strategi Internal | Nilai | Bobot | Skor  (Bobot X Ratting) |
| **1** | **Peluang *(Opportunities)*** |  |  |  |
|  | Kota Bandung dimana menjadi inspirasi untuk daerah lain | 3 | 0.35 | 1.05 |
|  | Menjadikan masyarakat mampu berwirausaha sehingga bisa memperbaiki perekonomian | 2 | 0.25 | 0.5 |
| **Jumlah Peluang** | |  | **0.6** | **1.55** |
| **2** | **Ancaman** |  |  |  |
|  | Sulit untuk menerapkan konsep yang sama dalam Bandung *Smart City* | -2 | 0.25 | -0.5 |
|  | Adanya ancaman dari sosial setempat terkait adanya fasilitas - fasilitas masyarakat yang sudah berjalan | -2 | 0.15 | -0.3 |
| **Jumlah Ancaman** | |  | **0.4** | **-0.8** |
| **Totl IFAS** | |  | **1.00** | **0.75** |

Competitive Posture = O + T

= 1.55 + (-0.8)

= 0.75

**4.3.4 Posisi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dalam Kuadran SWOT**

Setelah nilai atas skor masing-masing aspek, skor tersebut ditempatkan sebagai titik ordinat untuk menggambarkan daerah posisi terluas. Titik ordinat untuk menggambarkan daerah posisi terluas :

SO = (2.2 : 1.55)

WO = (-0.8 : 1.55)

WT = (-0.8 ; -0.8)

ST = (2.2 : -0.8)

Titik Ordinat untuk menggambarkan posisi organisasi dalam kuadran dan dalam posisi terluas dari aspek SWOT

(*Strength Posture*: 0) = (1.40 : 0)

(0 :*Competitive Posture*) = (0 : 0.75)

(*Strength Posture:Competitive Posture) =* (1.40 : 0.75)

Gambar 4.1

Posisi Organisasi dalam Kuadran SWOT

S

O

W

T

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

1,00

1,50

2,00

0,50

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

Kuadran I

Kuadran II

Kuadran III

Kuadran IV

**Gambar 4.1**

**Posisi Organisasi dalam Kuadran SWOT**

Dari gambar di atas, maka dapat diketahui strategi yang cocok digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dalam pengelolaan *E-Government* adalah pada kuadran I. Posisi ini menandakan KuadranI (positif,positif). Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat dan berpeluang, Rekomendasi strategi yang diberikana dalah **Progresif**, artinya Diskominfo Kota Bandung dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, dan meraih keberhasilan pengelolaan secara maksimal.

Strateg cocok dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung berdasarkan analisis SWOT adalah **Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mencapai atau meraih peluang (S - O),** meliputi:

1. Manfaatkan dan tingkatkan SDM aparatur dalam mengelola dana *E-Goverment*; dan
2. Memberikan tugas yang jelas kepada pegawai untuk mengeloladana *E-Goverment*;
3. **KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

Kesimpulan umum penelitian menunjukkan bahwa Impelemetasi Kebijakan *E-Government* dalam menciptakan *Smart Governance* di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung sudah baik, akan tetapi masih terdapat kekurangan. Hal ini bisa dilihat dari penemuan yang didapat oleh peneliti melalui observasi dan wawancara.diantaranya:

*Pertama*, Kedaaan kondisi lingkungan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung sudah baik. Tebukti dengan pendapat Informan bahwa ada kondisi sosial, kultural dan penerima program dalam upaya Pengelolaan *E-Government* dalam menciptakan *Smart Governance*.

*Kedua,* terkait Pengelolaan *E-Government* dalam menciptakan *Smart Governance* tapi dalam tahap pelaksaan masih lemah dalam segi pengawasan. Pola Pengelolaan *E-Government* dalam menciptakan *Smart Governance* masih belum merata terdapat perbedaan antara satu instansi dengan instansi yang lain.

*Ketiga,* dari hasil wawancara bersama respondn bisa disimpulakn bahwa dimensi sumber daya untuk Pengelolaan *E-Government* dalam menciptakan *Smart Governance* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, belum secara maksimal untuk Pengelolaan *E-Government* .

*Keempat,* dapat disimpulkan bahwa karakteristik dan kemampuan agen pelaksana implementasi kebijakan khususnya dalam Pengelolaan *E-Government* dalam menciptakan *Smart Governance* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung sudah bagus. Meskipun pola hubungan antar unit kerja dan norma-norma yang berlaku harus lebih ditingkatkan dalam pelaksaannya.

## Saran

## Saran Akademis

Hasil penelitian ini, penelitimenyarankan kepada peneliti lainnya yang ingin mengadakan penelitian dengan topik yang sama agar mengkombinasikan dengan teori lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.Selain itu diharapkan peneliti lainnya dapat melihat masalah dengan tidak dari satu sisi, namun dapat dilihat dari berbagai sisi.

Penelitian ini masih banyak faktor yang belum diteliti secara detail sehingga memungkinkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan faktor atau variabel yang diganti dengan faktor lainnya oleh peneliti lainnya.

1. Saran Praktis
2. Manfaatkan SDM aparatur dalam mengelola dana *E-Government.*
3. Memberikan tugas yang jelas kepada pegawai untuk mengeloladana *E-Government.*
4. Manfaatkan anggaran yang ada untuk menangani masalah yang ada.
5. Menjalankan Undang-Undang: Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 BAB XXI Pasal 386-390 Tentang inovasi Pemerintah Daerah.
6. Menyesuaikan alokasi dana *E-Government* dengan kebutuhan.
7. Mengupayakan pemerataan tingkat derajat/kesejahteraan kesehatan pada masyarakat.
8. Meningkatkan koordinasi didalam instansi dengan sebaik mungkin.
9. Mengintensifkan pelaksanaan pengawasan anggaran yang sangat baik.

## DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung:Alfabeta.

Al-Rasid, Harun.1994. *Analisis Jalur (Path Analysis) Sebagai Sarana Statistika Dalam Analisis Kausal*. Bandung: LP3ES Fakultas Ekonomi UNPAD.

Atmosudirdjo, Prajudi. 1982. *Administrasi dan Manajemen***.** Jakarta: Ghalia Indonesia.

Echols, John M dan Sadily, Hasan. 1992. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Handayaningrat, Soewarno. 1995. *Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen.* Jakarta: Gunung Agung.

Harits, Benyamin. 2002. *Paradigma Baru Dimensi-dimensi Prima Administrator Publik.* Bandung: Insani Press.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2006. *Profesionalisme dan Akuntabilitas Birokrasi Publik Berbasis Kinerja dalam Rangka Mewujudkan Good Governance*.Bandung: Universitas Pasundan.

Herdiansyah, Harish. 2011. *Metodologi PenelitianKualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial.*Jakarta: Salemba Humanika.

Henry, Nicholas. 1988. *Administrasi Negara dan Masalah-masalah Kenegaraan.*Terjemahan: Luciana D. Lontoh. Jakarta: Rajawali.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Perbandingan Administrasi Publik*. Bandung: Gava Media.

Iskandar. 2001. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Gramedia.

Islamy, M. Irfan. 1994. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara.* Jakarta: Bumi Aksara Jakarta.

Kasim, M. 1994. *Analisis Kebijakan Negara.* Jakarta: Erlangga.

Kristiadi, J.R. 1994.*Administrasi Pembangunan dan Keuangan Daerah.*Jakarta: Gramedia.

Kusumanegara, Solahudin. 2010*. Model dan Aktordalam Proses Kebijakan Publik.* Bandung: GavaMedia.

Mangkunegara, Anwar. 2004. *Manajemen Sumber Daya Perusahaan.* Bandung: Remaja Rosda Karya.

Martin, Mike W. dan Schinzinger, Roland. 1994. *Etika Rekayasa Edisi II.* Terjemahan: Prihminto Widodo. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

130

Nazir, Mohammad. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Ndraha, Taliziduhu. 2000. *Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia.* Jakarta: Rineka Cipta.

Pamungkas, Sri Bintang. 1996. *Pokok-pokok Pikiran tentang Demokrasi Ekonomi dan Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Daulat Rakyat.

Putra, Fadillah. 2001. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik, Perubahan dan Inovasi Kebijakan dan Ruang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik.* Surabaya: Pustaka Pelajar.

Rasyid, M. Ryaas. 1997. *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru.* Jakarta: IIP.

Silalahi. 1989. *Sistem Administrasi Pemerintahan.* Jakarta: Bina Aksara.

Sobandi, Baban. 2002. *Etika Kebijakan Publik.* Jakarta: Mutiara Ilmu.

Subarsono, AG.2011. Analisis kebijakan Publik : Konsep. Teori dan Aplikasi.Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sugiono. 1992. *Metoda Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Suradinata, Ernmaya. 1993. *Kebijakan, Keputusan dan Kebijaksanaan.* Bandung: Mandar Maju.

Wahab, Abdul Solihin. 1997. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara.* Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo, Joko. 2005. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja.* Malang: Bayu Media Publishing.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik.* Yogyakarta: MedPress.

**Dokumentasi**

Siti Widharetno Mursalim. 2017. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Dekonsentrasi pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah* Tesis Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

Rizki Mulyadi. 2010. *Evaluasi implementasi pelaporan proyek dekonsentrasi pada propinsi DKI Jakarta.* Tesis Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Indonesia.

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang: Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 BAB XXI Pasal 386-390 Tentang inovasi Pemerintah Daerah.